Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 17433-17449

Politik Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Laut (Studi Kasus di Dusun Sungai Sembilang, Kabupaten Banyuasin)

Musdalipa[1]

[1]Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author : **Musdalipa** E-Mail : musdalipa183@gmail.com

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Latar Belakang: Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir Indonesia menghadapi tantangan kompleks, terutama akumulasi sampah plastik yang mengganggu ekosistem mangrove dan mata pencaharian masyarakat di Dusun Sungai Sembilang, Kabupaten Banyuasin. Meskipun kebijakan nasional seperti Perpres No. 83/2018 menargetkan pengurangan 70% pada 2025, implementasi lokal masih lemah akibat ketidakseimbangan kekuasaan yang dianalisis melalui kerangka ekologi politik. **Tujuan:** Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah setempat dalam menangani sampah laut dan mengidentifikasi faktor penghambat menggunakan kerangka ekologi politik. **Metode:** Penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen melibatkan delapan informan kunci dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan stakeholder. **Populasi dan Sampel:** Aktor terkait pengelolaan sampah di Dusun Sungai Sembilang, dipilih secara purposive dan snowball sampling. **Analisis Data:** Model Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, verifikasi data). **Hasil:** Kebijakan lokal menekankan edukasi, kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat, dan kemitraan Pertamina, namun terhambat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarlembaga yang buruk. **Kesimpulan:** Pengelolaan sampah laut efektif membutuhkan redistribusi kekuasaan kepada komunitas lokal melalui tata kelola inklusif yang melampaui solusi teknis, memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekologi Politik, Pengelolaan Sampah, Pesisir, Sampah Laut, Tata Kelola

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir Indonesia menghadapi tantangan serius karena akumulasi sampah plastik yang tinggi, sebagian besar berasal dari daratan dan terbawa arus sungai. Diperkirakan 521.540 ton sampah masuk ke laut setiap tahun, dengan Indonesia sebagai penyumbang terbesar kedua secara global. Fenomena ini semakin parah di kawasan seperti Dusun Sungai Sembilang, Kabupaten Banyuasin, di mana sampah menumpuk di permukaan air, pesisir, dan akar mangrove, terutama saat musim hujan.

Sampah laut tidak hanya merusak estetika tetapi juga mengganggu ekosistem mangrove yang vital sebagai filter alami dan habitat biota laut. Penumpukan ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan, kerusakan alat tangkap, dan potensi masalah kesehatan masyarakat akibat bau busuk serta penyakit kulit. Selain itu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Taman Nasional Sembilang semakin nyata karena sampah plastik menghambat pertumbuhan vegetasi dan rantai makanan.

Pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang menghadapi regulasi yang belum optimal dan implementasi kebijakan lingkungan yang lemah di tingkat lokal. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih marak, didukung minimnya sarana prasarana seperti TPS dan daur ulang. Meskipun Perpres No. 83 Tahun 2018 menargetkan pengurangan 70% sampah laut pada 2025, pelaksanaannya terhambat di daerah pesisir seperti ini (Nasional et al., 2022).

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama, ditambah keterbatasan kapasitas teknis pemerintah desa. Masyarakat sering kali tidak memilah sampah, sementara kolaborasi antarpihak seperti pemerintah, swasta, dan komunitas belum merata. Hal ini memperburuk dampak terhadap nelayan dan ekosistem, dengan sampah organik maupun anorganik yang terus bertambah.

Faktor struktural seperti ketidakseimbangan kekuasaan dalam ekologi politik semakin memperumit pengelolaan, di mana kepentingan ekonomi mendominasi akses sumber daya. Komunitas lokal sering menjadi korban dampak tanpa kontrol penuh atas kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekologi politik (Robbins, 2012; Peluso & Watts, 2001). Konflik ini terlihat dari minimnya penegakan hukum dan koordinasi lintas sektor di wilayah pesisir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah setempat dalam menangani sampah laut di Dusun Sungai Sembilang dari perspektif ekologi politik, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Urgensinya terletak pada target nasional pengurangan 70% sampah laut pada 2025, di mana baseline 0.52 juta ton per tahun harus ditekan menjadi 0.16 juta ton untuk mendukung SDGs 14.1. Kebaruan penelitian ini adalah penerapan lensa ekologi politik pada studi kasus lokal di kawasan Taman Nasional Sembilang, yang mengintegrasikan dinamika kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan dampak ekologis untuk model pengelolaan inklusif yang belum banyak dieksplorasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali secara mendalam realitas sosial, politik, dan ekologis dalam pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Jenis penelitian kualitatif bersifat postpositivis, meneliti objek secara alami tanpa manipulasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama melalui triangulasi data. Pendekatan ini sesuai untuk studi kasus politik lingkungan, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2022) dan Sudaryono (2021) dalam metodologi kualitatif yang menekankan pemahaman makna kontekstual.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama mencakup pedoman wawancara mendalam, lembar observasi partisipan, serta protokol dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dari delapan informan kunci. Teknik pengumpulan melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan aparat desa, perangkat dusun, warga, dan aktor terkait seperti Kepala Bidang Sampah Banyuasin; observasi lapangan di lokasi sampah; serta studi dokumen kebijakan seperti Perpres 83/2018. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui reduksi (penyaringan data relevan), penyajian (narasi, matriks), dan verifikasi kesimpulan induktif untuk membangun proposisi tentang kebijakan dan hambatan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian terdiri dari aktor terkait pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang, termasuk pemerintah desa, masyarakat nelayan, dan mitra eksternal di Kabupaten Banyuasin. Sampel dipilih secara purposive dan snowball sebanyak delapan informan, seperti Kepala Dusun Christin Monika, Kepala Desa Romi Adi Chandra, Bidan Rokiyah HNZR, perwakilan warga, serta Mohammad Isnaeni dan Purna Irawan, yang representatif berdasarkan keterlibatan mereka. Teknik ini memastikan saturasi data sesuai prinsip kualitatif Emzir (2022) dan Creswell dan Creswell (2023) untuk kedalaman wawasan.

Prosedur Penelitian

Prosedur dimulai dengan persiapan pedoman, izin etik dari desa, lalu pengumpulan data bertahap melalui wawancara (direkam dan ditranskrip), observasi berulang, dan dokumentasi selama Maret-September 2025. Data divalidasi via member checking, dianalisis iteratif untuk tema ekologi

politik (Robbins, 2012; Peluso & Watts, 2001), dan disimpulkan dengan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini menjamin kredibilitas dan transferabilitas hasil secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Setempat Dalam Upaya Menangani Permasalahan Sampah Laut yang ada Di Dusun Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin dalam Perspektif Politik Lingkungan.

Dari sudut pandang politik lingkungan, dan jika dikaitkan dengan teori politik lingkugan maka kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lokal di dusun sungai sembilang, kabupaten banyuasin, dalam menanggulangi permasalahan sampah laut mengacu pada regulasi nasional yang mengintegrasikan pendekatan edukasi, pengawasan, dan kolaborasi antar Pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan presiden no. 83 tahun 2018 sebagai dasar hukum penanganan sampah laut dengan target pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Secara lokal, di wilayah dusun sungai sembilang, implementasi kebijakan ini. implementasi kebijakan ini mencakup beberapa aspek strategis yang melibatkan berbagai stakeholder. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, dinas kabupaten, hingga masyarakat dan stakeholder eksternal.

Permasalahan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai stakeholder, terutama pemerintah setempat sebagai pengambil kebijakan utama. Dalam konteks politik lingkungan, upaya penanganan sampah laut tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, kepentingan politik, dan interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menunjukkan komitmen dalam menangani permasalahan sampah laut melalui berbagai inisiatif kebijakan yang dikembangkan secara bertahap. Pendekatan yang diambil mencerminkan pemahaman bahwa masalah sampah laut bukan hanya persoalan teknis pengelolaan limbah, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan realitas kondisi lokal yang ada di wilayah pesisir. Salah satu manifestasi kebijakan pemerintah setempat adalah melalui penerbitan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan pesisir. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat politik untuk melegitimasi kewenangan pemerintah dalam mengatur perilaku masyarakat dan pelaku usaha. Dalam perspektif politik lingkungan, peraturan daerah ini mencerminkan bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, sekaligus menunjukkan bagaimana kepentingan lingkungan dipolitisasi dalam arena kebijakan publik.

Inovasi kebijakan dalam penanganan sampah laut juga mencerminkan kapasitas adaptif pemerintah setempat dalam merespons perubahan kondisi dan tantangan yang berkembang. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah, implementasi ekonomi sirkular, dan adopsi praktik-praktik terbaik dari daerah lain menunjukkan dinamisme dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks politik lingkungan, inovasi ini juga dapat menjadi sumber legitimasi politik bagi pemerintah setempat dalam membangun citra sebagai pemerintahan yang responsif dan progresif.

Dimensi regional dan global dari permasalahan sampah laut juga mempengaruhi formulasi kebijakan di tingkat lokal. Komitmen Indonesia dalam berbagai kesepakatan internasional terkait pengelolaan sampah laut, seperti SDGs dan berbagai konvensi lingkungan, memberikan tekanan dan sekaligus dukungan bagi pemerintah setempat untuk mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan standar global. Hal ini menunjukkan bagaimana politik lingkungan di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik lingkungan di tingkat nasional dan global.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala dusun Sungai Sembilang Ibuk Cristin Monika mengenai Kebijakan Pemerintah Setempat Dalam Upaya Menangani Permasalahan Sampah Laut yang ada Di Dusun Sungai Sembilang yaitu:

"Terkait pertanyaan yang ditanyakan mengenai Kebijakan Pemerintah Setempat dalam pengelolaan sampah

laut disini kami berupaya menangani permasalahan lingkungan yang ada Di Dusun Sungai Sembilang dengan cara melakukan berbagai macam strategi contohnya implentasi kebijakan di tingkat lokal , koordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi masih terdapat tantangan dalam proses implementasi ini dan masih kurangnnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya"(Wawancara pada tanggal 11 april 2025. Jam 13. 50).

Dari yang data wawancara diatas dan teori politik lingkungan maka upaya untuk menangani permasalahan sampah laut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Tingkat Lokal

Implementasi kebijakan penanganan sampah laut di tingkat lokal, khususnya di Dusun Sungai Sembilang, menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam menerjemahkan kebijakan formal menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses implementasi ini tidak dapat dipisahkan dari konteks politik lokal, dinamika sosial masyarakat, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam perspektif politik lingkungan, implementasi kebijakan merupakan arena di mana berbagai kepentingan, kekuasaan, dan nilai- nilai berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Mekanisme implementasi kebijakan penanganan sampah laut di tingkat dusun sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala dusun dan perangkat desa lainnya, memiliki peran strategis sebagai mediator antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Namun, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial di tingkat desa sering kali menjadi kendala dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan lingkungan.

Partisipas masyarakat dalam implementas kebijakan penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang menunjukkan pola yang beragam. Sebagian masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam program-program gotong royong pembersihan pantai dan edukasi lingkungan, namun sebagian lainnya masih menunjukkan sikap apatis atau bahkan resistensi terhadap perubahan perilaku yang diperlukan. Dalam konteks politik lingkungan, variasi respons masyarakat ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi tentang prioritas masalah, manfaat program, dan distribusi beban serta manfaat dari kebijakan lingkungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala dusun Sungai Sembilang Ibuk Cristin Monika mengenai mekanisme implementasi kebijakan penanganan sampah laut di tingkat lokal yaitu:

" Untuk saat ini implementasi kebijakan di dusun kami menghadapi banyak tantangan. Kami sudah berusaha menjalankan program sesuai arahan dari pemerintah kabupaten, tapi kenyataannya di lapangan berbeda. Infrastruktur masih terbatas, masyarakat belum sepenuhnya sadar, dan koordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten belum lancar. Kami sering merasa seperti berjalan sendiri tanpa dukungan teknis yang memadai" (Wawancara pada tanggal 11april 2025, pukul 13.25)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Keterbatasan infrastruktur menjadi faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara, kendaraan pengangkut sampah, dan fasilitas daur ulang, membuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi sangat challenging. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk mengembangkan strategi adaptif, seperti pembakaran sampah atau pembuangan ke sungai, yang justru bertentangan dengan tujuan kebijakan penanganan sampah laut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala dusun Sungai Sembilang Ibuk chistin Monika mengenai kendala utama dalam koordinasi vertikal dengan pemerintah kabupaten yaitu:

" Untuk sekarang Koordinasinya lemah sekali. Informasi sering terlambat sampai ke kami, anggaran tidak jelas kapan cairnya, dan yang paling menyulitkan adalah prosedur yang rumit. Untuk mengakses bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup saja, kami harus mendaftar dulu, padahal kondisi sampah laut di sini sudah mendesak" (Wawancara pada tanggal 12 april 2025, pukul 14.49)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Koordinasi vertikal antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam implementasi kebijakan menunjukkan kelemahan yang signifikan. Alur komunikasi yang tidak lancar, perbedaan interpretasi terhadap kebijakan, dan ketidakselarasan timing implementasi program sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam perspektif politik lingkungan, koordinasi vertikal ini tidak hanya melibatkan aspek teknis administratif, tetapi juga

negosiasi kekuasaan dan kepentingan antar level pemerintahan.

Aspek pembiayaan implementasi kebijakan di tingkat lokal menghadapi tantangan yang multidimensional. Keterbatasan anggaran desa untuk program lingkungan, ketergantungan pada bantuan dari pemerintah kabupaten atau sumber eksternal lainnya, dan kompleksitas prosedur pencairan dana sering kali menghambat kontinuitas program. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yang pada akhirnya mempengaruhi sustainabilitas upaya penanganan sampah laut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sungsang IV bernama bapak Romi Adi Candra

" Kami sebagai ujung tombak pelaksanaan program memang menghadapi keterbatasan kapasitas. Program dari kabupaten sering tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya program dari CSR Seperti pertamina yaitu program bank sampah, bagus idenya tapi masyarakat kami mayoritas nelayan

yang waktunya tidak tentu. Infrastruktur seperti TPS juga belum ada, jadi masyarakat bingung mau buang sampah dimana."(Wawancara pada tanggal 2 agustus 2025, pukul 13.36)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Inovasi lokal dalam implementasi kebijakan menunjukkan kreativitas dan adaptabilitas masyarakat dalam merespons keterbatasan sumber daya. Pengembangan bank sampah berbasis komunitas, program daur ulang sampah plastik menjadi produk kerajinan, dan sistem barter sampah dengan kebutuhan pokok merupakan beberapa contoh inovasi yang berkembang di tingkat grassroot. Dalam konteks politik lingkungan, inovasi- inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal.

Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan di tingkat lokal menghadapi keterbatasan dalam hal sistem pelaporan, indikator kinerja yang jelas, dan kapasitas analisis data. Ketiadaan sistem monitoring yang sistematis membuat sulit untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kondisi ini juga mempengaruhi akuntabilitas implementasi kebijakan dan transparansi penggunaan sumber daya publik.

Faktor eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, dan dinamika politik regional juga mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah laut di tingkat lokal. Perubahan pola cuaca yang mempengaruhi aktivitas nelayan, fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi daya beli masyarakat, dan perubahan prioritas politik di tingkat kabupaten dapat mengubah konteks implementasi kebijakan secara signifikan. Pembelajaran dari implementasi kebijakan di Dusun Sungai Sembilang menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam menangani permasalahan lingkungan di tingkat lokal. Kebijakan yang dirancang secara top-down perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan didukung oleh sistem koordinasi yang efektif serta alokasi sumber daya yang memadai.

A. Program Edukasi dan Sosialisasi

Program edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Dalam perspektif politik lingkungan, program edukasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran politik dan perubahan perilaku masyarakat. Melalui program edukasi, pemerintah berusaha membangun legitimasi kebijakan dan menciptakan dukungan publik terhadap upaya penanganan sampah laut.



Gambar 1. Program Edukasi dan Sosialisasi

Sumber: Dokumentasi masyarakat

Implementasi program edukasi di tingkat lokal menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal penyesuaian materi dengan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir. Masyarakat Dusun Sungai Sembilang yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan memiliki pola hidup dan nilai-nilai yang khas, sehingga pendekatan edukasi harus disesuaikan dengan konteks lokal tersebut. Program edukasi yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dengan realitas kehidupan sehari- hari masyarakat nelayan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala dusun Sungai Sembilang Ibuk Christin Monika mengenai strategi program edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah laut kepada masyarakat yaitu:

"Kami menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari pertemuan langsung di balai dusun, pemasangan spanduk, sampai memanfaatkan media sosial. Tapi tantangannya adalah menyesuaikan materi dengan karakteristik masyarakat nelayan. Mereka punya pola hidup yang berbeda, jadi pendekatan edukasinya harus disesuaikan dengan bantuan pihak pertamina"(wawancara pada tanggal 12 april, pukul 09.43)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Strategi komunikasi dalam program edukasi menggunakan berbagai media dan pendekatan, mulai dari pertemuan langsung di balai dusun, penggunaan media visual seperti poster dan spanduk, hingga pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Namun, efektivitas berbagai media komunikasi ini bervariasi tergantung pada karakteristik target audience. Masyarakat yang lebih tua cenderung lebih responsif terhadap pendekatan komunikasi langsung, sementara generasi muda lebih mudah dijangkau melalui media digital.

Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin informal dalam program edukasi menjadi faktor kunci keberhasilan. Tokoh-tokoh seperti kepala dusun dan bantuan dari pertamina ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Dalam konteks politik lingkungan, keterlibatan elit lokalini mencerminkan dinamika kekuasaan dan pengaruh yang ada dalam masyarakat, di mana legitimasi program pemerintah sangat bergantung pada dukungan dari para opinion leader di tingkat lokal.



Gambar 2. Program Edukasi

Sumber: Peneliti 2025

Materi edukasi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak sampah laut terhadap ekosistem pesisir, pengaruhnya terhadap aktivitas perikanan, hingga teknik-teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengemas informasi yang bersifat teknis dan ilmiah menjadi bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Hal ini memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dari para penyuluh dan fasilitator program.

Evaluasi terhadap program edukasi menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Namun, di sisi lain, perubahan perilaku yang signifikan masih memerlukan waktu yang lebih panjang dan pendekatan yang lebih intensif. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi memerlukan kontinuitas dan konsistensi dalam implementasinya, bukan hanya sebagai kegiatan satu kali atau jangka pendek.

Program edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi

kebijakan penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Dalam perspektif politik lingkungan, program edukasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran politik dan perubahan perilaku masyarakat. Melalui program edukasi, pemerintah berusaha membangun legitimasi kebijakan dan menciptakan dukungan publik terhadap upaya penanganan sampah laut. Implementasi program edukasi di tingkat lokal menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal penyesuaian materi dengan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir.

B. Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah

Pembentukan kelompok pengelola sampah merupakan strategi institusionalisasi upaya penanganan sampah laut di tingkat komunitas. Dalam perspektif politik lingkungan, pembentukan kelompok ini mencerminkan upaya desentralisasi tanggung jawab pengelolaan lingkungan dari pemerintah kepada masyarakat, sekaligus sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Proses pembentukan kelompok pengelola sampah di Dusun Sungai Sembilang melibatkan identifikasi dan rekrutmen anggota dari berbagai elemen masyarakat. Komposisi kelompok diupayakan representatif, melibatkan perwakilan dari berbagai profesi, kelompok umur, dan gender untuk memastikan bahwa perspektif yang beragam terakomodasi dalam pengelolaan sampah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam kelompok ini masih didominasi oleh kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki waktu luang dan motivasi tinggi terhadap isu lingkungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala dusun Sungai Sembilang Ibuk Christin Monika mengenai proses pembentukan kelompok pengelola sampah di dusun ini yaitu:

" Pembentukan kelompoknya dimulai dari musyawarah dusun. Kami mengidentifikasi warga yang punya motivasi tinggi terhadap isu lingkungan. Komposisinya diupayakan representatif dari berbagai profesi dan umur, tapi kenyataannya yang aktif masih didominasi ibu-ibu rumah tangga dan pensiunan yang punya waktu luang. Struktur organisasinya sederhana tapi fungsional dengan pembagian tugas yang jelas"(Wawancara tanggal 12 april 2025, pukul 10.02)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Struktur organisasi kelompok pengelola sampah dirancang sederhana namun fungsional, dengan pembagian tugas yang jelas antara koordinator, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana. Pembagian tugas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dalam kelompok. Dalam konteks politik lingkungan, struktur organisasi ini menjadi arena micro-politics di mana berbagai kepentingan dan ambisi personal dapat berinteraksi.

Aktivitas kelompok pengelola sampah mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengorganisasian gotong royong pembersihan pantai, pengelolaan bank sampah, hingga pengembangan program daur ulang sampah plastik. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga menciptakan dinamika sosial baru dalam masyarakat. Gotong royong pembersihan pantai, misalnya, menjadi momentum penguatan solidaritas sosial dan identitas kolektif sebagai komunitas pesisir yang peduli lingkungan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat dusun SungaiSembilang yaitu ibu ita, ibu endang, ibu mira dan ibu dede tentang kapasitas teknis anggota kelompok yaitu :

"Kapasitas teknis kami masih terbatas. Untuk teknik composting, daur ulang plastik, dan manajemen bank sampah, kami perlu pelatihan berkelanjutan. Kadang ilmu yang sudah didapat hilang lagi karena tidak dipraktikkan terus- menerus." (Wawancara tanggal 2 agustus 2025, pukull 12. 05)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa tantangan utama yang dihadapi kelompok pengelola sampah adalah sustainabilitas organisasi dan kegiatan.

Antusiasme awal yang tinggi sering kali menurun seiring berjalannya waktu, terutama ketika menghadapi kendala finansial atau konflik internal. Ketergantungan pada bantuan eksternal, baik dari pemerintah maupun LSM, juga menjadi kelemahan yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kontinuitas kelompok



Gambar 3. pengelolaan sampah daur ulang

Sumber: Peneliti 2025

Kapasitas teknis anggota kelompok dalam pengelolaan sampah masih memerlukan penguatan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pengetahuan tentang teknik composting, daur ulang plastik, dan manajemen bank sampah perlu terus ditingkatkan agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyediakan program capacity building yang berkelanjutan.

Pembentukan kelompok pengelola sampah mencerminkan upaya institusionalisasi pengelolaan lingkungan di tingkat komunitas. Proses rekrutmen yang representatif menunjukkan upaya demokratisasi, namun dominasi kelompok tertentu mengindikasikan adanya barrier partisipasi yang perlu diatasi.

C. Kerjasama dengan Stakeholder

Kerjasama dengan berbagai stakeholder merupakan dimensi krusial dalam implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Dalam perspektif politik lingkungan, kerjasama ini mencerminkan evolusi dari pendekatan government menuju governance, di mana pengelolaan lingkungan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah tetapi melibatkan berbagai aktor non-negara dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

Pemetaan stakeholder dalam penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang menunjukkan keragaman aktor yang terlibat, mulai dari lembaga pemerintah di berbagai tingkatan, LSM lingkungan, lembaga pendidikan, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Setiap stakeholder memiliki kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda, sehingga memerlukan strategi kerjasama yang spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik masing- masing aktor.

Kerja sama dalam pengelolaan sampah laut di Sembilang ini mereka bekerja sama dengan pihak pertamina dengan masyarakat dalam penanganan sampah laut, Peneliti melakukan wawancara dengan pihak pertamina yaitu bapak Purna Irawan dari KPI RU III Plaju mengenai bentuk kerjasama Pertamina dengan masyarakat dalam penanganan sampah laut yaitu:

" Kami berperan sebagai fasilitator program edukasi dan penyedia bantuan teknis. Kerjasama dengan masyarakat cukup baik, tapi setiap LSM punya agenda sendiri-sendiri yang kadang tidak sinkron. Kami fokus pada capacity building dan advokasi, tapi tantangannya adalah keberlanjutan program setelah proyek selesai. Masyarakat kadang terlalu bergantung pada bantuan eksternal seperti bantuann air yang kami berikan setiap mengumpulkan sampah ditukar dengan air bersih".(Wawancara pada tanggal 30 juli 2025, pukul 21.3 via zoom)

Dari hasil wawancara diatas Kerjasama dengan Pertamina menjadi salah satu bentuk partnership yang cukup signifikan dalam penanganan sampah laut di dusun tersebut. Pertamina berperan sebagai fasilitator program edukasi, penyedia bantuan teknis, dan advokat untuk kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Namun, kerjasama dengan LSM juga membawa dinamika politik tersendiri, terutama terkait dengan agenda dan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing organisasi.



Gambar 4. Kerja sama Pertamina dengan Masyarakat

Sumber: Arsip Pertamina

Dari gambar diatas merupakan Keterlibatan sektor swasta dalam penanganan sampah laut masih terbatas dengan melakukan penanaman mangrove karena minimnya insentif ekonomi dan regulatory framework yang mendukung partisipasi bisnis dalam program lingkungan. Beberapa usaha kecil lokal mulai terlibat dalam program daur ulang sampah plastik, namun skalanya masih sangat kecil dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penanganan sampah laut secara keseluruhan.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan, terutama sekolah-sekolah di sekitar dusun, memberikan peluang untuk program edukasi lingkungan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Integrasi materi pengelolaan sampah dalam kurikulum lokal dan program ekstrakurikuler lingkungan menjadi strategi jangka panjang untuk membentuk generasi yang lebih sadar lingkungan. Namun, kerjasama ini juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan kapasitas guru dalam menyampaikan materi lingkungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pertamina yaitu bapak Purna Irawan dari KPI RU III Plaju mengenai koordinasi antar stakeholder yaitu:

" Untuk saat ini Koordinasi antar stakeholder masih lemah. Setiap organisasi punya sistem perencanaan dan timing yang berbeda. Kadang ada tumpang tindih program, bahkan konflik kepentingan. Perlu mekanisme koordinasi yang lebih efektif, mungkin lewat forum multi-stakeholder"(Wawancara tanggal 30 juli, pukul 21.40 via zoom)

Dari wawancara diatas bisa dilihat bahwa koordinasi antar hal perbedaan agenda, timing, dan pendekatan. Setiap stakeholder memiliki sistem perencanaan dan implementasi yang berbeda, sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang fleksibel namun efektif. Dalam beberapa kasus, tumpang tindih program atau bahkan konflik kepentingan antar stakeholder dapat menghambat efektivitas upaya penanganan sampah laut.

Mekanisme kerjasama yang berkembang mencakup berbagai bentuk, mulai dari forum koordinasi informal, penandatanganan MoU, hingga pembentukan task force khusus untuk program-program tertentu. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihan mekanisme kerjasama harus disesuaikan dengan tujuan, sumber daya, dan karakteristik stakeholder yang terlibat.

2. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pihak Terlibat

Koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten dan berbagai pihak terkait merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sampah laut di Dusun

Sungai Sembilang. Pemerintah Kabupaten berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, keterlibatan pihak-

pihak seperti dinas lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat lokal, serta sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sinergi yang kuat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Romi Adi mengenai mekanisme koordinasi antara desa dengan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sampah laut yaitu:

" Untuk saat ini Koordinasi dengan pemerintah kabupaten masih belum optimal. Kami sering menghadapi birokrasi yang rumit dan alur komunikasi yang tidak lancar". (Wawancara tanggal 02 agustus 2025, pukul 12.46)

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa melalui koordinasi ini, perlunya perbaikan berbagai program pengelolaan sampah dapat dirancang secara terpadu, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien, dan hambatan yang muncul dapat diatasi bersama. Pertemuan rutin, forum diskusi, dan mekanisme pelaporan menjadi sarana penting untuk menjaga komunikasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu bapak Mohammad Isnaeni mengenai alasan mengapa tidak terlibat langsung di Dusun Sungai Sembilang yaitu:

"Ketidakterlibatan kami di Dusun Sungai Sembilang karena mereka tidak mendaftarkan diri sebagai wilayah yang memerlukan intervensi khusus. Sistem kami mensyaratkan pendaftaran formal dari desa atau masyarakat. Memang ada kelemahan dalam sistem deteksi dini kami, karena seharusnya permasalahan lingkungan bisa diidentifikasi proaktif tanpa harus menunggu laporan. Serta jauhnya lokasi dan sulitnya infrastruktur dusun tersebut yang menjadi kendala utama bagi kami, jadi kami tidak mengetahui separah apa daerah yang terdampak sampah tersebut"(Wawancara pada tanggal 22 juli 2025 pukul 12.07)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa bapak Romi Adi Candra mengenai mekanisme koordinasi yang selama ini terjalin antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan stakeholder lainnya dalam penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang yaitu:

" Untuk saat ini koordinasi dengan pemerintah kabupaten dilakukan melalui jalur hierarkis pemerintahan, yaitu desa- kecamatan-kabupaten. Namun, terdapat temuan yang cukup mengejutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin tidak terlibat secara langsung dalam penanganan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Hal ini disebabkan karena dusun tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai wilayah yang memerlukan intervensi khusus dari Dinas Lingkungan Hidup" (Wawancara tanggal 02 agustus 2025 pukul 13.06)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa fenomena ini mencerminkan kelemahan dalam sistem governance lingkungan yang bersifat struktural. Ketergantungan pada mekanisme pendaftaran formal menciptakan barrier dalam akses terhadap expertise dan sumber daya yang dimiliki institusi pemerintah yang relevan. Dalam konteks politik lingkungan, hal ini menunjukkan bagaimana struktur birokrasi dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan lingkungan.

Koordinasi yang lebih intensif justru terjalin dengan beberapa LSM lingkungan(Pertamina), Taman Nasional Berbak Sembilang, dan kadang-kadang dengan Pertamina sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintah kabupaten berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun koordinasi teknis masih terbatas.

3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah laut menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menghambat penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sementara dan sarana pengangkutan sampah.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi hambatan signifikan, terutama di kalangan yang masih mengnggap pengelolaan sampah bukan sebagai tanggung jawab bersama.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait dengan koordinasi kelembagaan dan partisipasi Masyarakat yaitu:

" Untuk saat ini tantangan utama terletak pada sistem koordinasi kelembagaan yang belum optimal.

Ketergantungan pada mekanisme pendaftaran formal dari desa-desa untuk mendapatkan bantuan teknis menciptakan gap dalam coverage program lingkungan. Banyak daerah yang sebenarnya membutuhkan intervensi justru tidak tersentuh karena ketidaktahuan tentang prosedur administratif atau keterbatasan kapasitas untuk mengajukan proposal dan jauhnya jarak Dusun Sungai Sembilang ini yang susah diakses kalo pun bisa harus membutuhkan anggaran yang banyak dari wilayah lainnya"(Wawancara tanggal 22 juli 2025, pukul 11.38)

Dari Wawancara diatas dapat dilihat bahwa Tantangan lainnya meliputi keterbatasan anggaran yang menghambat penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya tempat pembuangan sementara, sarana pengangkutan sampah, dan fasilitas pengolahan. Kondisi geografis wilayah pesisir yang sulit dijangkau juga mempersulit distribusi fasilitas dan layanan pengelolaan sampah.

Dari aspek sosial, resistensi sebagian masyarakat terhadap perubahan perilaku masih menjadi kendala signifikan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke badan air, masih terjadi akibat minimnya pemahaman tentang dampak jangka panjang. Faktor ekonomi juga berperan, dimana prioritas masyarakat yang bergantung pada hasil laut lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan immediate dibanding program lingkungan jangka panjang. Faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi, di mana kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi akibat minimnya edukasi dan pengawasan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal menyebabkan tumpang tindih tugas dan kurangnya kesinambungan program. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan insentif.

4. PerspektifMasyarakat tentang Pengelolaan Sampah

Perspektif masyarakat terhadap pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang sangat beragam dan mencerminkan kompleksitas sosial-ekonomi serta tingkat pemahaman yang berbeda terhadap isu lingkungan. Dalam konteks politik lingkungan, perspektif masyarakat ini menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu mengenai pandangan dan sikap masyarakat Dusun Sungai Sembilang terhadap masalah sampah laut, dan sejauh mana kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang ada yaitu;

" Sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan umumnya kami lebih terdampak langsung terhadap dampak sampah laut karena mengalami langsung bagaimana sampah plastik dapat merusak jaring dan mengurangi kualitas hasil tangkapan. Mereka mulai memahami korelasi antara kebersihan laut dengan keberlanjutan mata pencaharian mereka. (Wawancara tanggal 13 april 2025, pukul 16.34)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa perspektif masyarakat terhadap pengelolaan sampah laut sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan pengalaman hidup. Sebagian masyarakat menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan laut dan mendukung program pengelolaan sampah, terutama mereka yang telah mendapatkan edukasi dan merasakan dampak langsung dari pencemaran. Namun, ada juga kelompok yang masih kurang peduli atau merasa bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata.



Gambar 5. Diskusi Bersama masyarakat mengenai ekonomi dan kebutuhan sehari-hari mereka

Ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan sehari-hari seringkali menjadi prioritas utama sehingga partisipasi dalam program pengelolaan sampah menjadi terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan pemahaman yang mendalam, serta menciptakan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sampah seperti daur ulang dan pengembangan usaha berbasis sampah sangat penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu- ibu Masyarakat Dusun Sungai Sembilang mengenai pandangan Ibu terhadap program pengelolaan sampah di lingkungan ini, dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung program tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi keluarga yaitu:

"Sebenarnya program pengelolaan sampah ini bagus ya, tapi masih banyak warga yang belum paham betul caranya. Kalau bicara soal dampak ekonomi, memang ada sih beberapa ibu-ibu yang mulai pilah sampah plastik untuk dijual ke pengepul, lumayan buat tambahan uang belanja. Tapi yang jadi masalah, fasilitasnya masih kurang lengkap dan sosialisasinya belum merata ke semua RT. Kadang kita mau ikut program bank sampah, tapi tempatnya jauh dan jadwalnya tidak tetap. Kalau bisa diperbaiki sistemnya dan ada pelatihan yang lebih intensif, pasti masyarakat lebih semangat ikut serta."(Wawancara tanggal 02 Agustus pukul 11.30 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sebenarnya memiliki persepsi yang positif terhadap program pengelolaan sampah, meskipun masih terdapat keterbatasan pemahaman di tingkat grassroot. Hal ini menunjukkan bahwa program sudah mulai dikenal di masyarakat, namun belum sepenuhnya dipahami cara implementasinya secara praktis.

Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang

Dalam perspektif teori politik lingkungan, pengelolaan sampah laut sangat di pengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan politik, serta kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak terlibat. Pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang tidak hanya dihadapkan pada berbagai tantangan, tetapi juga didukung oleh sejumlah faktor yang dapat memperkuat upaya tersebut. Faktor-faktor pendukung ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang signifikan:

1. **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah berbagai kondisi, keadaan, masalah, atau keterbatasan yang menghalangi, mempersulit, mengganggu, atau menghambat upaya pengelolaan sampah laut sehingga tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal.



Gambar 6. Kondisi Sampah di Dusun Sembilang

Sumber: Peneliti 2025

Faktor penghambat ini mencakup segala hal yang menjadi kendala atau rintangan dalam implementasi program pengelolaan sampah laut, seperti keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, minimnya dukungan pemerintah atau kebijakan yang kurang tepat, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran atau dana operasional, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kondisi geografis yang sulit dijangkau, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta faktor sosial budaya yang tidak mendukung.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Sungsang IV mengenai faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang yaitu:

" Menurut pengamatan saya selama menjabat sebagai kepala desa, hambatan terbesar yang kita hadapi adalah faktor geografis dan lingkungan. Dusun Sungai Sembilang terletak di wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap pasang surut airlaut. Kondisi geografis ini membuat sampah dari berbagai daerah hulu terbawa arus dan terkumpul di wilayah kita. Ditambah lagi, topografi yang berupa rawa-rawa dan hutan bakau membuat akses untuk pembersihan menjadi sangat sulit. Cuaca yang tidak menentu dengan angin kencang dan gelombang tinggi juga sering menghambat kegiatan pembersihan pantai dan banyaknya jumlah sampah yang ada membuat susahnya pembersihan di walayah Dusun Sungai Sembilang" (Wawancara tanggal 2 Agustus 2025 pukul 11.30 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pandangan Kepala Desa Romi Adi Candra yang menekankan pada faktor geografis dan lingkungan menunjukkan bahwa kondisi alam menjadi tantangan fundamental yang harus dihadapi. Lokasi Dusun Sungai Sembilang yang berada di wilayah pesisir dengan karakteristik rawa-rawa dan hutan bakau memang secara natural menjadi tempat terkumpulnya sampah dari berbagai sumber. Faktor cuaca dan arus laut yang tidak dapat dikontrol manusia menjadi hambatan teknis yang signifikan dalam upaya pengelolaan sampah laut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan topik yang sama dengan narasumber Kepala Dusun Sembilang Ibu Cristin Monika yaitu :

"Dari perspektif saya sebagai kepala dusun yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, hambatan utama yang saya rasakan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Meskipun sudah berkali-kali kita sosialisasikan mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan laut. Mereka beranggapan bahwa sampah akan terbawa arus dan bukan lagi tanggung jawab mereka. Ketika kita mengadakan kegiatan gotong royong pembersihan pantai, partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Dari 200 kepala keluarga di dusun ini, yang aktif berpartisipasi hanya sekitar20-30 orang saja. Padahal dampak sampah laut ini dirasakan langsung oleh mereka, terutama para nelayan yang sering mendapat tangkapan ikan yang sudah terkontaminasi plastik."

(Wawancara tanggal 19 juli 2025, pukul 15.49)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Kepala Dusun Cristin Monika yang fokus pada aspek kesadaran dan partisipasi masyarakat mengungkap dimensi sosial dari permasalahan ini. Rendahnya kesadaran masyarakat mencerminkan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari pencemaran laut terhadap kehidupan mereka sendiri. Partisipasi yang rendah dalam kegiatan pembersihan menunjukkan bahwa masyarakat belum merasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan laut mereka.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan topik yang sama dengan narasumber pihak pertamina Bapak Purna Irawan yaitu:

" Dari padangan saya mengenai hambatan yang paling signifikan adalah faktor kelembagaan dan koordinasi. Meskipun Pertamina memiliki program CSR untuk pengelolaan sampah laut, implementasinya sering terkendala oleh koordinasi yang belum optimal antara berbagai pihak. Ada ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah, desa, masyarakat, dan perusahaan. Sering kali program yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai target karena kurangnya sinkronisasi jadwal dan kegiatan. Selain itu, birokrasi yang panjang untuk mendapatkan izin kegiatan pembersihan juga menjadi penghambat. Komunikasi antar lembaga masih belum efektif, sehingga sering terjadi tumpang tindih program atau bahkan kekosongan program di area tertentu. (Wawancara tanggal 27 juli, pukul 19.38)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pandangan perwakilan Pertamina, Purna Irawan, memberikan insight penting mengenai aspek kelembagaan dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah sampah laut, namun tanpa sistem koordinasi yang baik, upaya-upaya tersebut menjadi tidak efektif. Ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan di tingkat lokal.

Faktor-faktor penghambat ini dapat menyebabkan program pengelolaan sampah laut menjadi tidak berhasil, berjalan lambat, atau bahkan gagal total dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga perlu strategi. Ketiga faktor penghambat yang diidentifikasi oleh masing-masing narasumber saling berkaitan dan membentuk lingkaran masalah yang kompleks.

Kondisi geografis yang menantang membuat masyarakat merasa tidak mampu mengatasi

masalah sampah laut, sehingga kesadaran dan partisipasi mereka menurun. Di sisi lain, lemahnya koordinasi kelembagaan membuat program- program pengelolaan sampah tidak dapat berjalan optimal, yang pada akhirnya semakin menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Solusi tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan harus mengaddress semua faktor penghambat secara bersamaan. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Dari hasil seluruh wawancara diatas maka faktor penghambat pengelolaan sampah laut dibagi sebagai berikut:

A. Faktor Geografis dan Lingkungan

Dusun Sungai Sembilang memiliki kondisi geografis pesisir yang unik namun menantang untuk pengelolaan sampah laut. Terletak di area rawa-rawa dengan akses jalan terbatas, kendaraan pengangkut sampah sulit menjangkau wilayah ini. Ekosistem mangrove dan rumah panggung di atas sungai memperparah masalah karena kebiasaan membuang limbah rumah tangga langsung ke perairan akibat minimnya sanitasi dan akses air bersih.

Pasang surut laut menciptakan pola dinamis penyebaran sampah: pasang membawa sampah dari laut ke daratan, surut membawa sampah daratan ke laut. Pantai panjang dengan gelombang tinggi dan angin kencang terus menerus mendeposit sampah dari laut, sementara perubahan iklim memperburuk situasi.

Ekosistem mangrove sangat rentan; limbah plastik mengancam habitat dan kehidupan biota laut. Aksesibilitas terbatas memaksa strategi pengelolaan sampah yang adaptif terhadap kondisi geografis lokal, memerlukan pendekatan berkelanjutan yang hati-hati untuk melindungi lingkungan pesisir sensitif ini.

B. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur pengelolaan sampah di Dusun Sungai Sembilang sangat terbatas, tanpa TPS memadai sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan. Frekuensi pengangkutan sampah tidak rutin dan jalan buruk menghambat akses kendaraan, menyebabkan penumpukan sampah yang terbawa ke laut oleh air dan angin. TPA jauh dan tidak terjangkau memperburuk situasi, sementara fasilitas pengolahan yang ada tidak berfungsi optimal. Ketiadaan sarana transportasi efektif membuat pembersihan tidak optimal, mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem laut. Investasi infrastruktur strategis seperti TPS, TPA terjangkau, dan fasilitas pengolahan modern sangat diperlukan.

C. Faktor Ekonomi dan Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama pengelolaan sampah laut. Biaya besar untuk fasilitas (tempat sampah, kendaraan, TPS) tidak terpenuhi, sementara ekonomi masyarakat nelayan memprioritaskan kebutuhan primer. Dana operasional minim menghambat program berkelanjutan, pelatihan, dan sosialisasi. Pemerintah daerah kesulitan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah akibat keterbatasan keuangan.

Masyarakat enggan berpartisipasi karena fokus pada kebutuhan dasar dan ketiadaan insentif, serta sulit membeli produk ramah lingkungan. Diperlukan pendekatan inovatif seperti kemitraan swasta/ LSM dan pemberdayaan masyarakat untuk sumber pendanaan alternatif serta pengelolaan sampah berkelanjutan.

D. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama pengelolaan sampah laut; banyak yang menganggap membuang sampah ke laut (terutama organik) wajar karena dianggap terurai alami. Hal ini menyebabkan akumulasi sampah dan mencemari air, merusak ekosistem laut, serta berisiko kesehatan seperti penyakit air.

Partisipasi aktif minim dalam pembersihan, daur ulang, atau program lain akibat kurangnya pemahaman dampak negatif dan motivasi. Diperlukan kampanye edukasi intensif melalui penyuluhan, seminar, media sosial, dan keterlibatan tokoh masyarakat untuk menjelaskan risiko serta mendorong partisipasi aktif guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

E. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM terlatih menjadi penghambat utama efektivitas program pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Masyarakat dan petugas kebersihan kekurangan pengetahuan serta keterampilan profesional untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Minimnya personel untuk pembersihan rutin dan koordinator dedicated menyebabkan program tidak konsisten.

Kurangnya pelatihan berkontribusi pada ketidakmampuan menerapkan praktik pengelolaan yang baik. Diperlukan program pelatihan komprehensif mencakup teknik pengolahan sampah, pemahaman dampak lingkungan, dan keterlibatan lembaga pendidikan untuk membangun generasi sadar lingkungan serta meningkatkan kapasitas SDM lokal guna pengelolaan sampah yang efektif dan terarah.

F. Faktor Kelembagaan dan Koordinasi

Lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi penghambat signifikan pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang. Tidak adanya mekanisme jelas antara pemerintah desa, dinas terkait, masyarakat, dan LSM menyebabkan program parsial, tumpang tindih, dan kurang terintegrasi. Ketidakjelasan peran serta tanggung jawab menimbulkan kebingungan dan minim akuntabilitas.

Kurangnya sinergi dan komunikasi antarpihak membuang sumber daya sia-sia, membuat upaya tidak efektif serta berkelanjutan. Diperlukan jaringan kerjasama solid melalui forum atau kelompok kerja pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, perencanaan bersama, dan evaluasi, guna pengelolaan sampah yang terintegrasi dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan sampah laut di Dusun Sungai Sembilang dipengaruhi kuat oleh dinamika ekologi politik, di mana kebijakan pemerintah setempat seperti implementasi Perpres 83/2018 melalui edukasi, bank sampah, dan kolaborasi dengan Pertamina belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Faktor penghambat utama meliputi kondisi geografis pesisir yang sulit diakses, minimnya partisipasi nelayan, dan ketidakseimbangan kekuasaan antaraktor negara, swasta, serta komunitas, yang menyebabkan penumpukan sampah plastik mengancam ekosistem mangrove dan Taman Nasional Sembilang.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada sampel kecil delapan informan dan fokus studi kasus tunggal, sehingga generalisasi terbatas dan memerlukan verifikasi kuantitatif lebih lanjut. Saran untuk penelitian mendatang mencakup perbandingan multi-lokasi pesisir serta analisis longitudinal dampak kebijakan, sementara implikasi praktisnya adalah memperkuat dana desa untuk TPS, pelatihan rutin PKK/nelayan, serta forum multi-stakeholder untuk sinergi berkelanjutan guna capai target nasional 70% reduksi sampah laut 2025.

REFERENCES

Adriani, A., Djafar, S., & Yunus, M. (2023). Identifikasi sampah laut di pesisir Pulau Kodingareng Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari (JIWaLL), 1*(1), 96–107. https://doi.org/10.33096/jiwall.v1i1.427

Anggraini, E. (2022). Meningkatkan partisipasi publik dalam menangani sampah plastik laut. *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika, 4*(2). https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i2.10

Astuti, R., & Nufus, H. (2022). Edukasi bahaya sampah plastik kepada masyarakat pesisir di Pantai Pulot, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar. *Marine Kreatif, 6*(1), 36. https://doi.org/10.35308/jmk.v6i1.5533

Cahyati, S. P., Melinda, S., Savana, N. I., & Noviarin, Y. (2020). Indonesia's national plan of action for marine plastic debris as a form of implementation SDGs 14: Life below water. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17*(2), 95–105.

Chakrabarty, B., & Kandpal, P. C. (2024). Environmental governance in India. In B. Chakrabarty (Ed.), *Public administration in India*. https://doi.org/10.4324/9781003543954-15

Erna Mena Niman. (2020). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, 11*(1), 91–106. https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139

Faustine, V. I. (2023). Upaya pengurangan sampah plastik di laut Indonesia berdasarkan Konvensi Basel 1980 dalam rangka pemenuhan target Sustainable Development Goals ke-1. *Belli Ac Pacis, 8*(2), 90. https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74531

Fikry, I., Satrya, R., Jaelani, F., Auliya, P. K., & Nur, H. (2024). Penanganan sampah laut di Indonesia: Sebuah tinjauan. *Jurnal Teknologi Maritim, 7*(1). https://doi.org/10.35991/jtm.v7i2.40

Fitriansah, H. (2019). Keberlanjutan pengelolaan lingkungan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 8*(4), 360. https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492

Handayani, V. P. (2023). Dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut Gending Probolinggo. *Pendidikan dan Pembelajaran Biologi, 11*(2), 75–80. https://journal.um-surabaya.ac.id/Biologi/article/view/19252

Haryanti, N. (2023). Sampah laut dan pesisir akan musnahkan perikanan. [Artikel/opini].

Hidup, K. L., & Kehutanan, D. A. N. (2023). *Status lingkungan hidup Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jayantri Adinda Syawal, R. M. A. (2021). Strategi pengelolaan sampah di kawasan pantai. *Jurnal Kajian Ruang, 1*(2), 1–15. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr

Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif* (Vol. 17). [Penerbit tidak disebutkan].

Kedaulatan, W., Atas, R., & Ekologis, K. (2024). Platform politik lingkungan hidup Indonesia. [Policy paper].

Maulidyna, S. A. (2022). Politik hukum lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia. *Supremasi Hukum, 29*(2), 265–292. https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814

Mendalam, L. (2020). *Mengurangi polusi plastik secara radikal di Indonesia: Rencana aksi multipemangku kepentingan*. April.

Mengatasi, U., Plastik, S., & Laut, D. I. (2020). *Info Singkat X(10), II-P3DI, Mei 2018-223*. April.

Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3*(3), 1–12.

Murni Purnaningsih. (2016). *Teori antroposentrisme*. [Penerbit tidak disebutkan].

Nasional, L. K., Indonesia, R., Normanihadi, A. J. I., Ketahanan, L., & RI, N. (2022). *Republik Indonesia: Pengendalian sampah laut (marine debris) di perairan Indonesia dalam rangka …* [Laporan kebijakan].

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2020). *Louisiana marine debris emergency response guide: Comprehensive guidance document* (September). https://doi.org/10.25923/z8a8-vb57

Ningrum, C. A., & Rifawan, A. (2025). Peran ASEAN dalam penguatan kebijakan Extended Producer Responsibility di Indonesia melalui ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021–2025). *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8*(4), 3933–3946. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7585

Pangi, P., Rejo, P. T., Pantai, I. K., Laut, S., & Blitar, W. P. (2021). [Artikel tentang pengelolaan sampah pantai]. *Jurnal Perikanan Terpadu, 6*(22), 19–28.

PARTAI POLITIK & POLITIK HIJAU: Studi tentang kepedulian parpol terhadap politik yang prolingkungan di Kota Semarang Supratiwi. (2025). [Artikel/jurnal].

Patmah, N., & Mayrudin, Y. M. (2025). Diskursif politik lingkungan dan relasi aktor dalam kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10*(2), 384–400. https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/4696

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. [Lembaran Negara Republik Indonesia].

Pramesi, P. N., Herdiansyah, H., & Aminah, S. (2023). Perspektif politik lingkungan dalam membangun transportasi publik berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG), 10*(1), 1. https://doi.org/10.54324/j.mtl.v10i1.1055

Purba, B., Amruddin, Arham, I., Faried, A. R. A. I., Herawati, N. S. W. J., Johanis, A. R., & Sinaga, P. S. (2023). *Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.

Rachmayani, A. N. (2015). *Politik lingkungan Indonesia: Teori dan studi kasus*. [Penerbit tidak disebutkan].

Republik, N., & Tahun, I. (1945). Perumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi, 3*(2), 106–125.

Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics, 6*(1), 25–36. https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1235

Riksfardini, M. (2023). Analisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara. *Pentahelix, 1*(2), 217–236. https://doi.org/10.24853/penta.1.2.217-236

Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam community participation in pengelolaan sampah di bank sampah. *Jurnal Kebijakan Publik, 13*(3), 246–251.

Siti Khadijah Hidayat, Sri Sundari, & Marisi Pakpahan. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, 2*(2), 104–117. https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.723

Sosiologi, J. (2021). Politik lingkungan di Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 16*(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.1207

Yogatama, A. (2025). Mewujudkan kewarganegaraan ekologis melalui pendidikan politik Partai Hijau Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 14*(4), 992–1001.

Yudistira, A., & Nurkhamid, M. (2021). Penggunaan data mining dalam hit rate importasi jalur merah dengan model decision tree. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 5*(2), 187–202. https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1297